



DISIPLIN

Volume 26

Nomor 17

Halaman
i-ii
1-81Maret
2020

**HAK AZASI DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KULTUR BUDAYA HUKUM
DI-ERA OTONOMI DAERAH**

Oleh : Bambang Sugianto & Derry Angling Kesuma

**BATASAN PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI
TUJUAN PEMIDANAAN**

Oleh : Hasanul Mulkan & Luil Maknun

POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA

Oleh : Yuli Asmara Triputra, Wasitoh Meirani, Fransisca Ully Marshinta,
Silvama Oktanisa & Dewi Indasari

**UARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF IDEAL DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KONTRAK BISNIS**

Oleh : Rusniati Rusniati & Hendri. S

**PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN
BADAN PERLINDUNGAN SENKETA KONSUMEN (BPSK)
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**

Oleh : Liza Deshaini & Evi Oktarina

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PALEMBANG DAN KENDALANYA**

Oleh : Warmiyana Zairi Absi & Andi Candra

**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAKAR
PADA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MARTABAT PRESIDEN DAN
KEAMANAN NEGARA**

Oleh : Ismail Pettanase

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SEKTOR PANGAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 601 K/PDT.SUS/2010)**

Oleh : Enni Merita & Tobi Haryadi

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah hukum. Berisi tulisan ilmiah, ringkasan hasil penelitian, resensi buku atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para ahli, praktisi dan siapa saja yang berniat untuk berdiskusi dan menulis sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas



Majalah
DISIPLIN

EDITORIAL TEAM

EDITOR IN CHIEF :

- **Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.**
(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

MANAGING EDITOR :

- **Dra. Hj. Erleni, S.H., M.H.**
(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

EDITORS :

- **Tobi Haryadi, S.H., M.H.**
(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

- **Junaidi, S.Kom.**

(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

- **Dede Riansya Putra, S.IP.**

(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

REVIEWERS :

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
(F.H. Universitas Borobudur Jakarta)

Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.S.
(F.H. Universitas Pancasila Jakarta)

Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D.
(F.H. Universitas Janabadra Yogyakarta)

Prof. Dr. Sonny Zulhuda, Ph.D.
(Ahmad Ibrahim Kuliyah of Law IIUM Malaysia)

Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H.
(F.H. Universitas Surya Kencana Cianjur)

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
(F.H. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)

• **Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
(F.H. Universitas Sriwijaya Palembang)

• **Dr. Stefanus Laksanto Utomo, SH., M.Hum.**
(F.H. Universitas Sahid Jakarta)

• **Dr. Wasis Seseio, S.H., M.H.**
(F.H. Universitas Esa Unggul Jakarta)

• **Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.**
(STIH - Sumpah Pemuda Palembang)

• **Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**
(STIH - Sumpah Pemuda Palembang)

• **Dr. Herman Fikri, S.E., S.H., M.Hum., M.M.**
(STIH - Sumpah Pemuda Palembang)

ADMIN :

- **Andi Candra, S.H., M.H.**

(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

- **Sri Lestari Handayani, S.E., Sy.**

(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda)

Alamat Redaksi :

Jl. Kol. H. Animan Achyad (d/h. Jl. Sukabangun II) KM. 6,5

Lr. Suka Pandai No. 1610 Palembang - Sumatera Selatan

Telp. / Fax : (0711) 418873, ojs : disiplin.stihpada.ac.id, email : jurnaldisiplin@gmail.com

Redaksi dapat menyingkat dan memperbaiki tulisan yang akan dimuat, tanpa merubah maksud dan isinya.

Jurnal Ilmu Hukum, Terbit : Maret dan September

Terbit ± 80 halaman.

design dan cetak oleh : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

MAJALAH
DISIPLIN

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA

DAFTAR ISI
Vol. 26 No. 17, Maret 2020

DARI REDAKSI

**HAK AZASI DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KULTUR
BUDAYA HUKUM DI-ERA OTONOMI DAERAH**
Oleh : Bambang Sugianto & Derry Angling Kesuma 1-9

**BATASAN PENERAPAN PIDANA SEUMUR HIDUP
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN**
Oleh : Hasanul Mulkan, Luil Maknun 10-16

POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA
Oleh : Yuli Asmara Triputra, Wasitoh Meirani, Fransisca Ully Marshinta,
Silvama Oktanisa & Dewi Indasari 17-29

**ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF IDEAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS**
Oleh : Rusniati Rusniati & Hendri. S 30-40

**PERAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) DAN
BADAN PERLINDUNGAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA**
Oleh : Liza Deshaini & Evi Oktarina 41-49

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI KOTA PALEMBANG
DAN KENDALANYA**
Oleh : Warmiyana Zairi Absi & Andi Candra 50-59

**PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAKAR
PADA KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MARTABAT PRESIDEN
DAN KEAMANAN NEGARA**
Oleh : Ismail Pettanase 60-68

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SEKTOR PANGAN
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 601 K/PDT.SUS/2010)**
Oleh : Enni Merita & Tobi Haryadi 69-81

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA SEKTOR PANGAN
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 601 K/PDT.SUS/2010)**

Enni Merita, Tobl Haryadi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
tobishart910@gmail.com, faizquieta@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk kesejahteraan tenaga kerja yakni hak untuk bekerja, tanpa diskriminasi, dan membeda-bedakan status sosial pekerja yang mana nantinya dapat menimbulkan perselisihan hubungan kerja. Dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : *Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.* Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa : *"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus"*;

- a. *Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

Kata kunci : Hak-Hak Asasi, Pemenuhan, Kesejahteraan Tenagakerja

Abstract

Fulfillment of human rights stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia for labor welfare, namely the right to work, without discrimination, and discriminating the social status of workers which in turn can lead to disputes in employment relations. In Article 170 of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower states that: Termination of employment does not meet the provisions of Article 151 Paragraph (3) and Article 168, except Article 158, Article 160 paragraph (3), Article 162 and Article 169 null and void. by law and the employer is required to employ the worker / laborer concerned and pay all wages and rights that should be received. In Article 56 of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes which states that: "The Industrial Relations Court has the duty and authority to examine and decide";

- a. *First level regarding rights disputes;*
- b. *At the first and last level regarding conflicts of interest;*
- c. *First level regarding termination of employment disputes;*
- d. *First and last level concerning disputes between trade unions / labor unions in one company.*

Keywords: Human Rights, Fulfillment, Labor Welfare.

h. *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

Pengusaha sebisa mungkin harus berupaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya, pengusaha harus menciptakan suasana hubungan

kerja yang harmonis dan berkeadilan, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja juga perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perlunya pene-gakan tujuan hukum ketenagakerjaan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor :Ghalia Indonesia,2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan VOL.1 Pemahaman awal*. Jakarta : Kencana, 2013.
- Asyhadie, Zaeni. *Peradilan Hubungan Industrial*. Jakarta : Raja Grafindo, 2009.
- Asikin Zaenal H. dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT.Rajagrafindo Persada, 2010.
- Bambang, R.Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Pustaka Setia, 2013.
- Djumaldji.F.X., *Perjanjian Kerja, edisi revisi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2008.
- Eko Wahyudi,dkk., *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- H. S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*. Jakarta : Rajawali Press, 2013
- Hadis, Vedi, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta : LP3ES,2000.
- Jalil, Abdul. *Teologi Buruh Cet.1*, Yogyakarta : LKiS.
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, edisi revisi, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007
- Kansil, C.S.T. , *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993).
- Mahmud Marzuki,Petter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2008.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Panggabean, Mutiara S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bogor : Ghalia Indah, 2004
- Raharjo, Satijipto. "Ilmu Hukum". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sinamo, Nomensen. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Bumi Intitama Sejahtera, 2009.
- Soepomo. Iman. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Djambatan, 2016.
- , *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan, 1982.
- Sulaiman. Abdullah, *Hukum Ketenagakerjaan-Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta : Materi Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Syariah Dan Hukum UTN Jakarta, 2016-2018
- Sumanto, *Hubungan Industrial; Memahami dan menagatasi potensi konflik kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global*. Jakarta : CAPS, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.